

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. G. Karim. 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Ahmad Redy, 2014, *Hukum Pertambangan*, Gratama Publishing, Bekasi.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, 2016, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, PT. Balebat Dedikasi Prima, Jakarta.
- Daryanto, 1997, *Kampus Indonesia Lengkap*, Appolo, Surabaya.
- Eka Nam Sihombing, 2020, *Politik*, Enam Media, Medan
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Hans Kelsen. 1945, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Amerika Serikat
- Hariawan Bihamding, 2019, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*, Deepublish, Yogyakarta.
- John Rawls. 1971, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press, Amerika Serikat.
- Lawrence M. Friedman. 1975, *The Legal System*, Russell Sage Foundation, Amerika Serikat.
- Maria Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Moh. Mahfud, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Rahyunir Rauf, 2018, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Zanafa Publishing, Yogyakarta.

Regen. B.S., 2006, *Politik Hukum, Utomo*, Bandung.

Rozali Abdullah, 2010, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salim, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Persada Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.

Suteki dan Galang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Depok.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 301.K/MB.01/MEM.B/2022 Tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batu Bara Nasional Tahun 2022-2027

C. Jurnal, Tesis, Artikel, Internet

Ishak, 2007, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Seta Disertasi*, Alfabet, Bandung

Syahriza Alkhour, 2019, Politik Hukum Mencari Sejumlah Penjelasan, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10, No,1

Lasantha, Politik dan Hukum Siapa yang Mempengaruhi, Siapa yang Dipengaruhi, <https://kontakbanten.co.id>, dikunjungi pada tanggal 22 Desember 2023 jam 19.27

Indah, 2014, Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No.2

Arif Fajri, 2018, Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran, *Menara Ilmu*, Vol. 12, No.6

Fahrul Gafar, 2022, Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.3

Roziqin, 2023, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *Jurnal de jure*, Vol 15, No.2

Dyah Ayu Widowati, 2019, Hak Penguasaan atas Sumber Daya Alam Dalam Konsepsi dan Penjabarannya dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16, No.2

Febri Handayani, 2023, Hak Menguasai Negara dalam Pengaturan Sumber Energi Baru dan Terbaruan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1

Slamet Suhartono, 2013, Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No.18

Victor Imanuel Williamson Nalle, 2012, Hak Menguasai Negara atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya, *Jurnal Konstitusi*, Vol.9, No.3

Paul Sinlaeloe, Hak Menguasai Negara, Memaknai Hak Menguasai Negara, <https://www.kompasiana.com>, dikunjungi 29 Desember 2023, pada jam 00.38

Giso Christianto, 2022, *Ratio Legis Hak Menguasai Negara Terhadap Sumber Daya Mineral dan Batubara*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara.

Ira Sumaya, Tinjauan Hukum Regulasi dan Sistem Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara di Daerah, <https://jdih.bpk.go.id>, dikunjungi pada tanggal 29 Desember 2023 jam 14.52

Aviva, F.N, 2023, Pengaruh Teori Positivisme Hukum Dan Teori Utilitarisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia, *Jurnal Relasi Publik*, Vol.1, No.4

Rahayu. D.P, dan Faisal, F, 2021, Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba, *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 16, No.1

Listiyani, N, 2017, Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara Al-Adl, *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No.1

Nishaf Roazi Jamil, Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Serta Dampak Pada Otonomi Daerah, *Jurnal Staatsrecht*, Vol. 2, No.2